

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI GERAKAN FILANTROPI ISLAM DI KABUPATEN BELITUNG

Agustari*¹, Toni Kurniawan²

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, INDONESIA

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, INDONESIA

*Correspondence: ✉ agustari060897@gmail.com

Abstract

*Social development is an important component in the concept of sustainable development. Problems of poverty, health, education, and conflicts that occur in a community group because of the inconsistency between communities, plus the problem of government policies that are not populist. Therefore, social integration is needed that together perform roles according to their respective functions. This study aims to analyze social development policy strategies through synchronizing the Islamic Philanthropy Movement with social development programs in the analysis of the 2018-2023 Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) of Belitung Regency. This research is a descriptive qualitative research where the author wants to show, examine and analyze the main problem in philanthropy is the lack of appropriate strategies in the management of the Amil Zakat Institution (LAZ) and the Amil Zakat Agency (BAZ) in Belitung Regency. The findings of this study indicate that there is a relationship between the Human Development Index and the Islamic Philanthropy Movement and an established development policy strategy for the long term. This contribution has an influence on regional social development policies, so that welfare and prosperity will be realized and *falah* will be achieved through synergy and collaboration of programs that are well targeted and valuable.*

Abstrak

Pembangunan sosial merupakan komponen penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan konflik yang terjadi di suatu kelompok masyarakat karena adanya ketidakselarasan antar masyarakat, ditambah persoalan kebijakan pemerintah yang tidak populis. Oleh karena itu dibutuhkan integrasi sosial yang bersama-sama melakukan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pembangunan sosial melalui sinkronisasi Gerakan Filantropi Islam dengan program-program pembangunan sosial di analisis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018-2023 Kabupaten Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana penulis ingin menunjukkan, mengkaji serta menganalisis permasalahan utama dalam filantropi adalah masih kurangnya strategi yang tepat dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada di Kabupaten Belitung. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Gerakan Filantropi Islam dan strategi kebijakan pembangunan yang mapan untuk jangka panjang. Kontribusi ini memberikan pengaruh terhadap kebijakan pembangunan sosial daerah, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran akan terwujud dan *falah* akan tercapai melalui sinergi dan kolaborasi program-program yang tepat sasaran dan bernilai guna.

Article History

Received: 03-07-2022

Revised: 18-12-2022

Accepted: 25-12-2022

Keywords:

Empowerment Movement;

Philanthropy;

RPJMD;

Social Development

Histori Artikel

Diterima: 03-07-2022

Direvisi: 18-12-2022

Disetujui: 25-12-2022

Kata Kunci:

Filantropi;

Gerakan Pemberdayaan;

Pembangunan Sosial;

RPJMD



A. PENDAHULUAN

Pembangunan sosial di definisikan sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Pembangunan sosial merupakan suatu babak perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan untuk saling melengkapi babak pembangunan ekonomi.¹ Kemunculan pemikiran pembangunan sosial yaitu diawali dari sebuah refleksi atas evaluasi terhadap jalannya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dinilai menyisakan sebuah distorsi masalah sosial yaitu kemiskinan. Seiring dengan kemajuan kapitalisme, meningkat pula tekanan masalah sosial sehingga hendak menyadarkan pentingnya pemikiran pembangunan yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari aspek fisik, tetapi juga merespon masalah pembangunan yang terdistorsi. Pembangunan terdistorsi dianggap sebagai residu pembangunan yang muncul karena paradigma yang salah tentang pembangunan dimana pembangunan yang terjadi tidak lagi berpandangan pada kesejahteraan manusia. Pembangunan sosial berupaya melakukan pendekatan utuh (*macro perspective*) yang memfokuskan pada masyarakat, terutama pada perencanaan intervensi dengan suatu pendekatan perubahan yang dinamis terencana, umum, yang kesemuanya itu menuju keselarasan antara intervensi sosial dengan upaya pembangunan ekonomi.

Persoalan kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan konflik horizontal antar masyarakat yang sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, justru diperparah dengan persoalan-persoalan baru seperti kebijakan pemerintah yang tidak populis dan terkesan temporer, serta benturan horizontal antar kelompok masyarakat.² Dalam agama Islam, secara teologis menyebut kemiskinan sebagai suatu yang harus segera diselesaikan dan menjadi tanggung jawab bagi semua muslim. Bahkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT mensiasati mereka yang tidak mau terlibat dalam pengentasan kemiskinan sebagai orang yang mendustakan agama (Al-Qur'an Surah Al-Ma'un: 3). Teologi keagamaan universal ini sendiri perlu dijadikan basis perilaku menuju kesalehan sosial sekaligus sebagai landasan dalam gerakan *social salvation*, yang dimana bukan menjadikan agama sebagai sumber persoalan, melainkan sebagai langkah *problem solving* atas berbagai persoalan kemasyarakatan.

Namun dalam menjawab persoalan atas permasalahan itu, gerakan filantropi Islam hadir dan menjawab tantangan tersebut. Kekuatan filantropi di agama Islam menjadi pondasi awal pergerakan Islam yang begitu besar.³ Kehadiran organisasi atau lembaga filantropi seolah-olah menjawab kejumudan program pemerintah yang sifatnya temporer. Banyak diantara penggiat filantropi adalah mereka yang menempati jabatan strategis, berlimang harta namun 'haus' akan kenikmatan hubungan sosial kemasyarakatan. Kebutuhan sosial inilah yang diwujudkan dalam aksi-aksi filantropi. Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua organisasi islam terbesar di Indonesia merupakan fakta kongkrit dalam perkembangan filantropi Islam di Indonesia, dimana

¹ Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial (Bandung: Alfabeta, 2010).

² Syamsul Bakri, "Agama, Persoalan Sosial, dan Krisis Moral," 2009, 5.

³ Emaridial Ulza And Herwin Kurniawan, "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam" 2, No. 1 (2018): 11.

organisasi islam ini mempunyai lembaga khusus untuk menangani persoalan-persoalan sosial dan ekonomi seperti halnya Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

Dalam Surah Al-Hasyr: 7 berbunyi “Islam mengajarkan Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya”. Sebagai sebuah gerakan yang berkembang di Indonesia, filantropi cukup memberikan kontribusi dalam pengembangan masyarakat sejak zaman penjajahan Belanda hingga sampai masa reformasi saat ini, baik dalam bentuk materi maupun jasa. Sejarah filantropi islam di Indonesia yang sangat mengakar ini mempunyai dinamika dan lika-liku yang kompleks, dimana religiusitas masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam memberikan peran dan semangat tersendiri dalam perkembangan filantropi islam. Wujud dari filantropi di Indonesia memang tidak kalah banyaknya seperti filantropi yang berlabel sektarian agama, pluralis, multi national corporates (MNC), dan lain-lain.⁴

Terlepas dari kontestasi yang ada, filantropi Islam bisa memberikan sumbangsih untuk pembangunan sosial masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan oleh derasnya arus globalisasi. Lembaga-lembaga filantropi islam di beberapa daerah terkhususnya di Kabupaten Belitung yang di praktekkan oleh BAZNAS dan LAZISMU di realisasikan dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal baik berupa hibah maupun dana bergulir. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk *charity* seperti bantuan pendidikan, kesehatan, bantuan sarana dan prasarana ibadah tidak lepas dari jangkauan filantropi islam.⁵ Sedangkan di Kabupaten Belitung mempunyai 3 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia yang secara aktif menjalankan aktifitas filantropi khususnya ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dengan berbagai macam cara dalam proses penyaluran kepada yang membutuhkannya.

Secara konseptual tidak bisa kita pungkiri bahwa Islam dengan doktrinnya dalam Al-Qur'an telah menggariskan dasar visi yang transformatif dan liberatif untuk kemanusiaan. Di Indonesia dengan berbagai macam persoalan dan problematika kebangsaan yang sangat kompleks juga menjadi perhatian bersama, baik kalangan akademis maupun para praktisi yang mencoba mencari jalan alternatif demi tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana yang ditegaskan Al-Qur'an bahwa urusan kemanusiaan adalah satu, maka seyogyanya Negara dan umat Islam menolong mereka yang termarginalkan dalam sebuah prinsip kemanusiaan dan kebangsaan.⁶

Menurut Sulkifli dalam penelitiannya yang berjudul *Filantropi Islam Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Indonesia* menyatakan bahwa pembangunan modal sosial di era globalisasi sangat dibutuhkan, mengingat perekonomian dunia yang bebas saat ini sungguh persaingan yang ketat dan kejam. Dimana salah satu dasar modal sosial (*social capital*) ini selain dari pada pengetahuan dan keterampilan adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain.⁷

Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Delfiyando dengan judul *Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* ditemukan hasil bahwa lembaga filantropi sangat membantu mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan ZIS yang baik dan

⁴ Zaenal Abidin, “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang” 15 (2012): 18.

⁵ Machrus And Frida Utami, “Peran Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas,” In *Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Lppm Universitas Muhammadiyah Purwokerto* (Purwokerto, 2015).

⁶ Hilman Latief and Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, 1 (Jakarta: Serambi Ilmu Sejahtera, 2015).

⁷ Sulkifli Sulkifli, “Filantropi Islam Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Indonesia,” *Palita: Journal Of Social-Religion Research* 3, No. 1 (August 27, 2018): 1–12, <https://doi.org/10.24256/Pal.V3i1.190>.

terpercaya bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dampaknya pun langsung dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Dan juga dari penelitian Rizal dan Mukaromah dengan judul *Filantropi Islam Solusi atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19* mengemukakan hasil bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik dengan pengelolaan dana secara produktif. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga filantropi tersebut pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membuktikan bahwa filantropi Islam mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan.

Sehingga dari beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan peran gerakan filantropi Islam, menjelaskan bahwa meningkatkan peran serta lembaga filantropi Islam bisa menjadi salah satu upaya untuk mendukung serta mentransformatif kebijakan pembangunan sosial di suatu daerah. Kebaruan dalam penelitian ini adalah seiring dengan gencarnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) yang salah satu variabelnya diukur dalam pembangunan sosial di masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Maka, dalam praktik modernisasi kebijakan pembangunan sosial di suatu daerah khususnya di Kabupaten Belitung dirasa perlu untuk menghubungkan serta mensinkronisasikan potensi-potensi gerakan filantropi Islam dalam menunjang serta mendukung kebijakan pembangunan sosial yang transformatif, terstruktur dan populis.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mendeskripsikan secara mendalam strategi kebijakan pembangunan sosial di Kabupaten Belitung melalui gerakan Filantropi Islam. Disinergikan serta di kolaborasikan dengan program-program atau produk-produk kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2019-2023 Kabupaten Belitung untuk dianalisis secara mendalam hubungan atau korelasi di antara keduanya, sehingga menghasilkan sebuah strategi kebijakan pembangunan sosial unggulan yang menjadi gerakan filantropi Islam lebih baik. Selain itu juga berkontribusi memberikan pengaruh terhadap kebijakan pembangunan sosial daerah, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran akan terwujud dan *falah* akan tercapai melalui sinergi dan kolaborasi program-program yang tepat sasaran dan memiliki *value added* yang bernilai guna.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi atau gambaran mengenai dinamika dan peran gerakan filantropi Islam dalam pembangunan sosial di Kabupaten Belitung, dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh yang sesuai. Dalam penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dimana dalam merekonstruksi dan mengevaluasi data ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dengan analisis tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dilihat dari sifat penelitian ini yang bersifat analisis deskriptif, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika dan peran gerakan filantropi Islam dalam pembangunan sosial di Kabupaten Belitung. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Kemudian sumber data yang mendukung penelitian ini berupa data primer yaitu kaidah atau peraturan dasar dengan menganalisis dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan tahun 2018-2023. Sedangkan data sekunder berupa literatur hasil-hasil penelitian, artikel atau jurnal dan data pendukung lainnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan Publik

Berikut di bawah ini ditampilkan tabel Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2021.

Tabel 3. APBD, PAD, PDRB, dan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	APBD (Milyar Rupiah)	PAD (Miyar Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
					Angka Harapan Hidup (%)	Harapan Lama Sekolah (%)	Kelayakan Hidup (Ribu)
1	Kabupaten Bangka	1.578,01	134,82	10.733.699,95	71,14	12,78	12.424
2	Kabupaten Bangka Barat	1.281,10	74,13	10.331.789,00	70,08	11,70	12.269
3	Kabupaten Bangka Selatan	1.101,09	39,40	6.275.554,66	68,35	11,38	11.768
4	Kabupaten Bangka Tengah	940,66	102,36	5.986.898,00	71,52	12,10	12.945
5	Kabupaten Belitung	890,70	149,63	6.710.007,00	71,10	11,86	13.563
6	Kabupaten Belitung Timur	875,34	113,26	5.713.650,00	72,10	11,63	11.760
7	Kota Pangkal Pinang	853,10	137,42	9.611.883,37	73,41	13,16	15.716

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2019-2021 (2021)

a. Gambaran Umum Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan gambaran mengenai capaian pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam faktor-faktor produksi yang terpilah menurut lapangan usaha. Dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 dilihat dari Prouk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah daerah Kabupaten Bangka yang berada di tingkat teratas, diikuti Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan yang paling rendah adalah Kabupaten Belitung Timur. Struktur perekonomian selain mencerminkan peranan lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB, juga dapat menggambarkan lapangan usaha unggulan yang menggerakkan perekonomian dalam suatu daerah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka dilihat dari PDRB ADHK Tahun 2021 sebesar 10.733.699,95 (dalam juta rupiah) yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor produksi dalam sektor PDRB menurut Lapangan Usahanya yang dominan adalah Industri Pengolahan (2.614.857,80), diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2.147.877,17), kemudian sumber daya alam (SDA) berupa Pertambangan dan Penggalian (1.501.601,27), serta Perdagangan Besar dan Eceran (1.202.812,49). Sebaliknya Kabupaten Belitung Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah, memiliki PDRB ADHK Tahun 2021 yang hanya bertumpu pada sektor lapangan usaha tertinggi yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1.426.658,00) dan Industri Pengolahan (1.163.844,00) dan sumber daya alam (SDA) berupa Pertambangan dan Penggalian (996.758,00). Memang secara keseluruhan bahwasannya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadikan pertambangan menjadi sektor yang masih berperan besar dalam perekonomian dengan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Bangka (diluar minyak dan gas bumi) untuk mineral logam, non logam, dan batuan sebesar 322.952 ha (dilihat dalam RPJMD Kabupaten Bangka).

b. Gambaran Umum Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan suatu pengukuran perbandingan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak, yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk kedalam kategori negara maju, negara berkembang, ataupun negara terkebelakang. IPM kali ini akan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pertumbuhan ekonomi dalam hal ini diperlihatkan melalui diagram *scatter plot*. Diagram *scatter plot* fungsinya sebagai pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut apakah hubungannya positif, hubungannya negatif ataupun tidak ada hubungan sama sekali (Kho, 2013). Scatter plot atau scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari titik-titik (point) dari nilai sepasang variabel (variabel x dan variabel y). Berikut disajikan tabel IPM dengan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021:

Tabel 4. Indeks Pertumbuhan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021

Kabupaten/Kota	IPM 2021	Pertumbuhan 2021 (%)
Kabupaten Bangka	72,46	7,48
Kabupaten Bangka Barat	69,60	0,21
Kabupaten Bangka Selatan	67,06	3,61
Kabupaten Bangka Tengah	70,89	4,76
Kabupaten Belitung	72,57	5,64
Kabupaten Belitung Timur	71,42	4,55
Kota Pangkal Pinang	78,57	9,27

Sumber: Data diolah dari BPS Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2021

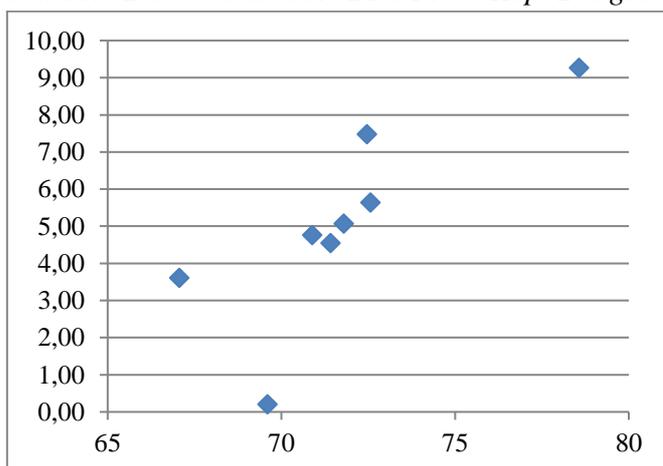


Diagram Scatter Plot

Dari hasil *scatter plot* yang di proses dengan Microsoft Excel diperoleh nilai koefisien ($r^2 = 0,793034$). Artinya hubungan yang terbentuk bersifat positif antara IPM dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semakin tinggi capaian pembangunan manusia, maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atau dengan kata lain apabila nilai variabel indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat, maka akan meningkat pula variabel yang lain yaitu pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Dalam korelasi yang terbentuk antara kedua variabel tersebut berada pada

tingkatan hubungan yang kuat, terlihat dari nilai koefisien korelasi yang mendekati 1 yaitu sebesar 0,793034.

Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kapasitas ekonomi yang baik dan tinggi, akan berdampak juga pada tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terlihat pada Kota Pangkal Pinang yang mempunyai presentase pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara daerah Kabupaten/Kota lainnya sebesar 9,27% yang berdampak pula pada nilai IPM yang juga berada pada level tertinggi yaitu sebesar 78,57 lebih tinggi dari pada IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 yang hanya sebesar 71,80.

Kondisi Umum Pembangunan Sosial Kabupaten Belitung

a. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung

Mengacu kepada visi dan misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, yaitu :

“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”

Adapun makna yang terkandung di dalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Ekonomi Berkeadilan, bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;
- 2) Berdaya saing, bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;
- 3) Inovatif, mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

b. Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung

Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Secara ringkas, dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Misi Pertama:** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

- 2) **Misi Kedua:** Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) **Misi Ketiga:** Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Disamping itu perlu pula percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global.

c. Program Pembangunan Sosial di Kabupaten Belitung

Dibawah ini penulis akan menyajikan beberapa program-program yang berkaitan dengan pembangunan sosial yang ada di Kabupaten Belitung. Program pembangunan sosial diklasifikasikan dalam 3 (tiga) fokus yaitu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1) Program Pengentasan Kemiskinan

Pengembangan ekonomi lokal. Prioritas pengembangan KUMKM dan Koperasi bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing KUMKM dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap kewirausahaan para pengusaha/calon pengusaha, peningkatan produktifitas, peningkatan ragam produk-produk unggulan dan meningkatnya unit koperasi yang mandiri dan maju. Meningkatkan kualitas dan keberagaman investasi di berbagai sektor dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi daerah dan menjadikan investasi sebagai pemicu perkembangan sektor hulu dan sektor hilir, serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Program pelayanan pendidikan, penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin/tidak mampu. Presentase masyarakat miskin/tidak mampu dan berprestasi akan mendapatkan bantuan berupa pendidikan yang layak. Kemudian dilakukannya program penanganan pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat kurang mampu dengan diberikan skill atau kemampuan yang dibutuhkan di lapangan kerja.

2) Program Pendidikan dan Kesehatan

Akses pendidikan untuk semua. Prioritas pembangunan pendidikan difokuskan kepada pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan sehingga mampu memenuhi atau mencapai standar pendidikan (SNP) yang meliputi komponen standarisasi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Memberikan pelayanan pendidikan dalam upaya mengembangkan potensi, penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional.

Pelayanan kesehatan terintegrasi. Prioritas pembangunan kesehatan terintegrasi meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Peningkatan Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, meningkatkan sumberdaya kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga non medis, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Perwujudan dari pelayanan kesehatan terintegrasi ini dalam bentuk inovasi yaitu SEHATI (Sistem Kesehatan

Terintegrasi) serta Program Pelandok (Pencet Telepon dan Dokter Langsung Bergerak) Dengan adanya program SEHATI ini sistem pelayanan sudah terintegrasi dengan instansi terkait dan dalam pelaksanaannya program ini memberikan pendampingan kepada pasien rujukan keluar daerah lengkap dengan berbagai fasilitas, seperti mobil penjemputan di Bandara Soekarno Hatta sampai pemberian uang saku. Program Pelandok ini mengadopsi kebutuhan masyarakat yang bertujuan meningkatkannya pelayanan kesehatan secara prima gratis 24 jam dan terintegrasi dengan Call Center 119 dan kartu SEHATI.⁸

3) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender.⁹ Melihat hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Belitung menetapkan arah kebijakannya dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender serta program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam mendukung setiap peluang atau potensi peningkatan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung serta meningkatkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDG's)* dirasa perlu memperhatikan satu aspek penting yang harus menjadi prioritas arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Aspek prioritas tersebut adalah berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia atau *human capital* berupa peningkatan aspek pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat.

Filantropi Dalam Islam

Istilah filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *philos* berarti cinta dan *antrophos* yang berarti kemanusiaan. Filantropi merupakan suatu bentuk kepedulian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang di dasarkan pada kecintaan sesama manusia. Lebih jauh lagi konseptualisasi filantropi adalah praktik *giving*, *service* dan *association* secara sukarela untuk membantu pihak lain. Bisa dimaknai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian. Filantropi berkembang dalam dua varian besar yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial.¹⁰ Disamping itu, filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang diperhatikan masalah duniawi, terutama masalah kemiskinan. Agama tidak hanya menuntun umatnya untuk mengurus kehidupan akhirat saja, tetapi juga menyangkut tentang kehidupan duniawi, terutama masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.¹¹

Istilah filantropi Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Dalam ayat alQur'an (QS. al-Bayyinah: 4-6), ada tiga perintah

⁸ Pemerintah Kabupaten Belitung, "Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023" (BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2019).

⁹ "Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan". <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

¹⁰ Abidin, "Manifestasi Dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi Di Rumah Zakat Kota Malang.", *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Volume 15, No 2, Desember 2012.

¹¹ Rizki Delfiyando, "Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)" (IAIN Metro, 2019).

yang harus diimplementasikan oleh setiap Muslim, yaitu menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya, melaksanakan ibadah secara teratur, dan mempraktikkan kedermawanan secara teratur. Allah menyuruh seorang Muslim untuk berfilantropi supaya harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7). Pentingnya filantropi Islam bisa dilihat dari cara al-Qur'an menekankan keseimbangan antara zakat dan shalat. Begitu tegasnya perintah mengenai zakat, al-Qur'an mengulang sebanyak 72 kali perintah zakat (ita' az-zakât) dan menggandengkannya dengan perintah salat (iqam ash-shalat).¹²

Dasar filosofi filantropi adalah menjaga harkat dan martabat manusia, tindakan berderma harus dilakukan dengan cara-cara yang moderat dan tidak berlebihan (QS. al-Furqan: 67). Dalam memberikan derma pemberi sama sekali tidak boleh menyebabkan penerima merasa dipermalukan apalagi terhina (QS. al-Baqarah: 264). Al-Qur'an juga secara khusus menekankan pentingnya memberikan derma berupa barang-barang yang disukai, yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk (QS. al-Baqarah: 267). Oleh karena itu, konsep filantropi dalam al-Qur'an sejatinya mengandung nilai-nilai kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi, dan saling memperkuat antar sesama.¹³

Potensi dan pola perilaku menyumbang masyarakat Indonesia sebagai sumber dana dan sumber daya merupakan tradisi dan budaya yang sangat mendukung berkembangnya kegiatan filantropi. Sejumlah organisasi modern memanfaatkan tradisi ini untuk menggalang *fundraising* dan partisipasi dari masyarakat. Banyaknya lembaga-lembaga sosial yang berbasis Islam serta eksistensi Lembaga Filantropi pada ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah (LazisMU), Nahdlatul Ulama (LazisNU), dan lainnya yang ditopang dengan dana filantropi yang membuktikan semakin kuatnya tradisi filantropi dalam masyarakat Indonesia.¹⁴ Sejarah panjang perjalanan Indonesia telah membuktikan, praktek-praktek filantropi telah mewabah dalam masyarakat sipil kita sejak dari zaman pra-kolonial, kolonial, orde lama, orde baru, kemudian fase reformasi. Hal ini jelas bahwa zakat, sedekah dan wakaf sudah di praktekkan di bumi Nusantara dan mengalami perubahan sesuai konteks kebutuhan ummat islam itu sendiri. Bahkan dalam praktiknya kegiatan ini mengarah pada sebuah usaha untuk membangun sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan umat Islam, peningkatan kualitas kesehatan melalui upaya pembangunan klinik maupun rumah sakit serta memperkuat ekonomi ummah melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar tanpa intervensi dari pemerintah.

Gerakan Filantropi Islam dan Pembangunan Sosial Di Kabupaten Belitung

Islam merupakan agama yang syumul yang mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan dan juga aspek pembangunan baik itu aspek ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Pembangunan menurut Islam adalah bersifat mult-dimensi yang meliputi aspek fisik, kerohanian dan moral. Penilaian pembangunan berpusat kepada konsep tauhid yaitu Allah SWT sebagai pemilik mutlak dan manusia sebagai khalifah yang bertanggungjawab membangunkan alam semesta berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁵

¹² Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)," *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (November 11, 2016): 227, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>.

¹³ Abdurrohman Kasdi, "Membangun Kemandirian Melalui Filantropi Kaum Perempuan; Potensi Kedermawanan Untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia," *Palastren Jurnal Studi Gender* 12, No. 1 (June 12, 2019): 99, <https://doi.org/10.21043/Palastren.V12i1.3184>.

¹⁴ Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* Vol 10 No 2 (December 30, 2017): 223-236 Pages, <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>.

¹⁵ Nor Sahida Mohamad and Sanep Ahmad, "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal," 2013, 17.

Pembangunan menurut Islam sebenarnya tertumpu kepada aspek pembangunan manusia yang mengandung perserikatan fisik, rohani dan sosial budaya. Aktifitas pembangunan sebagai implementasi dari ibadah, sesuai dengan ketentuan bahwa „setiap amal saleh adalah ibadah“, bersifat produktif dan kontributif. Tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat melalui keadilan dalam pendistribusian sumberdaya alam dan kekayaan bersama, dalam konteks ini, Islam memiliki pendekatan yang lebih komprehensif terhadap konsep Masyarakat Sejahtera.¹⁶ Sehingga, Islam menganggap manusia sebagai tempat berlakunya aktivitas pembangunan.

Gerakan filantropi Islam di Kabupaten Belitung terbilang cukup unik. Hal tersebut dari semangat dan kesadaran masyarakat untuk bisa berfilantropi melalui lembaga dan pemahaman keagamaan yang cenderung ingin mengedepankan aspek kolektif. Adanya lembaga filantropi Islam yang tersebar menjadi dua bagian yakni: pertama, apresiasi dan komitmen pemerintah dengan mendirikan semacam lembaga semi otonom sebagaimana tergambar dengan berdirinya BAZNAS, dianggap sebagai lembaga semi otonom hal ini didasarkan pada amanah undang-undang dan postur kepengurusan yang mampu mengakomodir dari unsur pemerintah (SKPD) dan masyarakat (tokoh masyarakat dan akademisi). Kedua, lembaga filantropi yang berdiri dan besar berkat peran dan semangat masyarakat sebagaimana tercermin dengan berdirinya LAZISMU dan LAZISNU. Tentu saja keberadaan BAZNAS cukup berbeda pengelolaan dengan LAZISMU dan LAZISNU yang unsur kepengurusannya berasal dari induk organisasi yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Disamping pentingnya pengawasan, maka mengetahui secara lebih jauh mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana filantropi Islam kedua lembaga tersebut juga akan membantu citra kepercayaan lembaga dihadapan masyarakat.

Gambaran Umum Kondisi Umat Islam Di Kabupaten Belitung

Islam yang merupakan salah satu agama mayoritas yang dominan di Kabupaten Belitung memiliki sejumlah potensi yang bisa dikembangkan dalam mendukung pembangunan, terutama pembangunan sosial. Berikut disajikan data beberapa gambaran terkait kondisi berupa fasilitas-fasilitas bagi umat Islam di Kabupaten Belitung sebagai berikut:

Tabel 5. Data Jumlah Kondisi Fasilitas Umat Islam di Kabupaten Belitung

No.	Data/Keterangan	Jumlah	
1	Masjid (Sumber: https://data.belitung.go.id/dataset/data-jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-belitung/resource/11527077-76b4-44fd-a0a8-a41ba1fbf3ff)	Kecamatan Tanjung Pandan	51
		Kecamatan Badau	20
		Kecamatan Membalong	36
		Kecamatan Selat Nasik	4
		Kecamatan Sijuk	26
	Total	137	
2	Mushala (Sumber: https://data.belitung.go.id/dataset/data-jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-belitung/resource/11527077-76b4-44fd-a0a8-a41ba1fbf3ff)	Kecamatan Tanjung Pandan	95
		Kecamatan Badau	14
		Kecamatan Membalong	18
		Kecamatan Selat Nasik	5
		Kecamatan Sijuk	19
	Total	151	
3	Madrasah	RA (Raudhatul Athfal)	10

¹⁶ Edyson Saifullah, “Pembangunan Dalam Islam,” *I-Finance*, 2, 2 (2016): 92–106.

	(Sumber: Kementerian Agama RI Dirjen Pendidikan Islam 2018/2019)	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	2
		MTS (Madrasah Tsanawiyah)	3
		MA (Madrasah Aliyah)	2
		Total	17
4	Pondok Pesantren (Sumber: http://babel.kemenag.go.id)	Kecamatan Tanjung Pandan	5
		Kecamatan Sijuk	1
		Total	6
5	Fasilitas Kesehatan (Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2019)	Rumah Sakit Umum (RSU)	3
		Puskesmas	9
		Puskesmas Pembantu	32
		Klinik	11
		Posyandu	143
		Poskesdes	38
		Polindes	1
Total	237		
6	Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadawah)	BAZNAS Belitung	1
		LAZISMU Belitung	1
		LAZISNU Belitung	1
		Total	3
7	Organisasi Kemasyarakatan (Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung, 2020).	Ormas Kepemudaan	13
		Ormas Keagamaan	37
		Total	50
8	Majelis Taklim	Berdasarkan data SIMPENAIIS (Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam) bahwa di Kabupaten Belitung tidak ada Majelis Taklim yang terdaftar.	-

Filantropi Islam Sebagai Pilar Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan semangat kedermawanan dan potensi masyarakat Indonesia terkhususnya di Kabupaten Belitung, kedermawanan masyarakat juga tengah mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan mengerahkan semua potensi yang ada, para pelaku filantropi menunjukkan kepada masyarakat bahwa perhatian terhadap orang-orang yang kekurangan dan membutuhkan bantuan sangat penting. Bentuk perhatian dan tanggung jawab ini tidak serta merta hanya dibatasi oleh materi dan kebutuhan jangka pendek, melainkan penanaman nilai dan semangat perubahank ke arah yang lebih baik.

Upaya untuk mendukung kegiatan filantropi dalam rangka pemberdayaan pembangunan manusia adalah melalui kegiatan penggalangan dana (*fundraising*). Kegiatan *fundraising* ini tidak hanya penting, melainkan sudah menjadi ruh pada semua kegiatan filantropi. Aktifitas penggalangan dana ini mampu mengarahkan serta mendorong masyarakat untuk kegiatan berderma pada program-program yang diinginkan. Upaya-upaya untuk mendorong serta meningkatkan kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan perhatian pada beberapa aspek-aspek dalam *fundraising* agar lebih memihak pada pemberdayaan pembangunan sumber daya manusia.

Filantropi sebagai upaya pemberdayaan pembangunan manusia merupakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga yang berbasis filantropi awalnya dibangun dengan kerelawanan dan aktualisasi diri. Kegiatan ini sangat membutuhkan proses identifikasi diri yang mirip dengan apa yang disebut Maslow sebagai hierarki kebutuhan (*hierarchy of needs*). Para pelaku filantropi mengkategorisasikan kebutuhan akan aktualisasi diri, sekaligus rasa cinta dan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, lembaga-lembaga filantropi baik BAZNAS, LAZISMU dan LAZISNU yang ada di Kabupaten Belitung telah memperlihatkan keberhasilan program-program pendidikan bagi masyarakat. Ada tiga manfaat yang di dapat dari bantuan dana pendidikan ini, yaitu *pertama*, memenuhi kebutuhan pendidikan Islam bagi anak-anak tanpa perlu mengeluarkan biaya, *kedua*, peningkatan kepercayaan masyarakat pada sekolah-sekolah yang di bentuk maupun didirikan oleh lembaga filantropi, dan *ketiga*, peningkatan semangat belajar bagi siswa-siswi. Misalnya program Beasiswa Mentari dan Beasiswa Sang Surya yang disediakan oleh LAZISMU Belitung yang merupakan gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim dan pelajar dari keluarga pra sejahtera (dhuafa) yang berupa paket donasi pendidikan yang digunakan untuk keperluan pendidikan anak asuh, diantaranya pembayaran SPP dan pengadaan keperluan sekolah lainnya.¹⁷ Ini juga berdampak pada pengembangan kualitas bagi al-mustahiq (golongan berhak menerima zakat).

Bentuk pengalokasian dana zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga filantropi Islam di Belitung mengacu pada beberapa peraturan pemerintah dan perundang-undangan, begitupula dengan tanggung jawab dan wewenang BAZNAS, LAZISMU dan LAZISNU dalam menyelenggarakan penyaluran zakat secara produktif. Kabupaten Belitung yang merupakan salah satu daerah yang mayoritas berpenduduk muslim, tidak heran apabila zakat menjadi potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan atau sekaligus menyeimbang perekonomian daerah yang tidak stabil.

Banyaknya bentuk-bentuk pengalokasian dana pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga filantropi Islam di Belitung mengindikasikan pada komitmen filantropi Islam di Indonesia untuk pembangunan jangka panjang dan *sustainable* demi tercapainya masyarakat yang bebas dari keterbelakangan mental, pendidikan maupun sosial-ekonomi. Dengan ini filantropi Islam menjadi penting dalam mendorong pendidikan di daerah ke arah lebih baik dan berkelanjutan.

Penguatan-penguatan dalam menumbuhkan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sangat diperlukan aktifitas-aktifitas berbasis filantropi Islam untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik di dunia globalisasi saat ini. Peran filantropi khususnya wakaf juga sangat penting dalam proses perkembangan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh ormas-ormas Islam. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat yang lembaga-lembaga pendidikannya di dukung oleh gerakan wakaf. Gagasan pendirian lembaga pendidikan adalah bagian integral dari perspektif kaum muslim dalam memberikan solusi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk juga dalam menentaskan kemiskinan.¹⁸ Pendirian pesantren-pesantren di Indonesia juga tidak terlepas dari peran dan fungsi wakaf tanah yang pada akhirnya membantu proses pendidikan Islam dengan tidak membebankan biaya bagi pelajar. Gerakan filantropi Islam mini menjadi modal sosial tersendiri dalam perkembangan dan pertumbuhan dunia pendidikan Indonesia hingga saat ini.

¹⁷ <https://lazismubelitung.or.id/program-lazismu-belitung/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.

¹⁸ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam Di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

Pembangunan sosial berupa modal sosial di era globalisasi saat ini sangatlah dibutuhkan, mengingat perkembangan perekonomian dunia saat ini sangat semakin bebas. Modal sosial secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi. Ini juga diungkapkan oleh Pierre Bourdieu bahwa modal tidak hanya sekedar sebagai alat produksi, namun juga mempunyai makna yang luas, dan dapat di klasifikasikan kedalam tiga golongan: (a) modal ekonomi, (b) modal kultur, dan (c) modal sosial. Maka filantropi dalam islam sangat berkembang pesat di Indonesia karena pada dasarnya modal sosial yang berbasis kedermawanan dan islam mempunyai garis lurus yang sama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat tanpa ada diskriminasi satu sama lain.

Selain memperhatikan pembangunan modal sosial, teori pembangunan berbasis manusia tidak lepas perannya dalam mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik secara sosial-ekonomi. Menurut Korten dalam Badrun menyatakan, pembangunan berbasis manusia (People Centered Development) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan serta berkesinambungan.¹⁹ Dengan ini, pembangunan yang berkelanjutan dan bermartabat dapat tercapai tanpa ada yang tidak terakomodasi secara keseluruhan. Secara prinsipil, ada tiga titik tekan dalam memaknai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) ini, yaitu Pertama, komitmen pada keadilan dan fairness, dimana perhatian utama diberikan pada masyarakat miskin dunia dan pemberian hak-hak generasi yang akan datang. Kedua, sebagai pandangan jauh kedepan yang menekankan pada prinsip-prinsip pencegahan (precautionary), Ketiga, mengintegrasikan, memahami, sekaligus bertindak dalam kesalinghubungan yang kompleks yang ada diantara lingkungan, ekonomi dan masyarakat.²⁰ Jadi pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai suatu pandangan masa depan dengan melakukan tindakan-tindakan proaktifitas atas segala macam persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Sinkronisasi Potensi Umat Islam Dengan Prioritas Pembangunan Sosial Di Kabupaten Belitung

Banyaknya pemberitaan di media sosial yang terus-menerus mengangkat masalah konflik keagamaan dikhawatirkan akan membangun opini di masyarakat bahwa agama banyak mengandung masalah. Namun sebenarnya, keberadaan agama merupakan hal yang positif dan dapat menjadi sebuah potensi pembangunan. Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan (IKT) di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belitung 2018-2023, menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) tujuan yang salah satu tujuan tersebut menurut penulis dipandang memiliki potensi agar bisa diprioritaskan yaitu "Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat." Pembangunan manusia memang menjadi faktor penting untuk terus diberdayakan. Umat Islam harus bisa mengambil peran strategis dalam upaya pembangunan baik di daerah maupun nasional. Umat Islam bisa berperan dalam meningkatkan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berakhlak mulia.

¹⁹ Badrun Susantyo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Pedesaan Telaahan Atas Tulisan David C. Korten," *Sosio Informa* 12, No. 3 (December 20, 2007), <https://doi.org/10.33007/Inf.V12i3.971>.

²⁰ Budi Winarno, *Etika Pembangunan* (Jakarta: Caps, 2013).

Kabupaten Belitung berdasarkan data ketersediaan fasilitas-fasilitas beragama umat Islam, kemudian banyaknya ormas ke-Islaman dan serta ketersediaan lembaga ke-Islaman termasuk kedalam indikator mayoritas terbanyak di Pulau Belitung. Sehingga salah satu peran yang dapat dilakukan umat Islam terkhususnya di Kabupaten Belitung dalam membangun SDM yang unggul dan berkualitas adalah melalui lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam dapat berperan aktif dalam memberikan pendidikan akhlakul karimah, untuk memberikan bekal keimanan dan keilmuan yang dapat dipersiapkan melangkah kedalam Era Industri 4.0 atau bahkan 5.0. Disamping melalui lembaga pendidikan Islam, pembangunan SDM oleh umat Islam juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi ekonomi melalui zakat, infaq dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat serta lembaga keuangan Islam yakni perbankan syariah. Sehingga penguatan kampanye dana zakat, infaq dan sedekah harus digiatkan melalui menjadikan masjid sebagai pusat baitul maal untuk masyarakat di setiap desa ataupun daerah di Kabupaten Belitung yang terdaftar dibawah koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Strategi yang bisa dilakukan untuk memajukan potensi umat Islam dalam mendorong partisipasi pembangunan dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga pendanaan yaitu yang *pertama*, adalah dengan kaidah pendekatan teknologi atau K (*Knowledge*)-Ekonomi; *kedua* pemantapan dan pelaksanaan sistem ekonomi yang berteraskan Islam, termasuklah perbankan Islam, pajak gadai Islam, sistem Takaful, perburuhan Islam, dan lain-lain; dan *ketiga* lebih bersifat mikro yaitu pembangunan modal insan sebagai keutamaan yang perlu diberikan penekanan utama.

Demi tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang bisa memaksimalkan seluruh potensi SDM umat Islam, maka dirasa pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian untuk menselaraskan program-program yang akan diimplementasikan. Program-program yang bisa diarahkan untuk bisa memajukan potensi SDM umat Islam agar bisa mendorong partisipasi pembangunan berdasarkan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) adalah disajikan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Program Penyesuaian Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Untuk Pemberdayaan Potensi Umat Islam Dalam Pembangunan

No.	Program Awal	Program Yang Disesuaikan	Dinas/Badan
1.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program ini bisa di-selaraskan dengan mem-berdayakan lembaga-lem-baga zakat, infaq dan sedekah untuk hadir di setiap lapisan masyarakat di desa-desa untuk memper-mudah akses pelayanan zakat, infaq dan sedekah.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DSPPA)
2.	Program Peningkatan Akses Permodalan	Dapat disesuaikan dengan mentransformasikan sis-tem ekonomi berteras-kan Islam. Misalnya melalui perbankan syariah untuk memudahkan proses perm-odalan bagi masyarakat.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja (KUKMPTK)
3.	Program pembinaan dan	Pembinaan dirasa memang	Badan Kesatuan

	pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	perlu dilakukan baik untuk pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya kepada setiap lembaga maupun ormas serta OKP yang bernafaskan Islam, demi bersama-sama mendukung pembangunan di daerah dan nasional.	Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
--	---	---	---------------------------------

Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung 2018-2023

Pemerintah daerah Kabupaten Belitung sebagai lembaga eksekutif pemangku kebijakan harus bisa mensinkronisasikan program-program inovatif dengan potensi umat Islam yang mendominasi, demi menanggulangi persoalan sosial (kemiskinan) serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Strategi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dan tidak bisa diabaikan dalam pembangunan daerah. Peningkatan pemberdayaan masyarakat ini diarahkan pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, serta meningkatkan peran kelembagaan di desa untuk mengakomodir program kepala daerah, yaitu Program KEMINANGAN (Kearifan Lokal dan Adat Istiadat sebagai Inspirasi Pembangunan). Program inovatif kepala daerah tersebut bisa dikolaborasikan untuk sekaligus memberikan sosialisasi pentingnya melakukan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang bisa hadir pada setiap desa-desa yang ada di Kabupaten Belitung. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan zakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu demi perlahan mengentaskan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Belitung melalui sinkronisasi dan kolaborasi program pemerintah daerah dengan potensi umat Islam.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pembangunan sosial di Kabupaten Belitung pada penerapannya dapat diwujudkan melalui Gerakan Filantropi Islam. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah bahwa adanya hubungan atau saling berkorelasi antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Gerakan Filantropi Islam dan strategi kebijakan pembangunan yang mapan untuk jangka panjang yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kebijakan di pemerintahan. Gerakan filantropi Islam melalui lembaga-lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dapat memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan pembangunan manusia, baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan maupun pendidikan untuk meminimalisir persoalan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Melalui sinkronisasi penyesuaian program-program yang termaktub di dalam RPJMD Kabupaten Belitung, pemangku kebijakan harus lebih jeli melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh umat Islam sebagai kaum mayoritas di Kabupaten Belitung dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial yang melahirkan sebuah kebijakan yang populis bagi masyarakat.

Konsep filantropi sedang digencarkan oleh pemerintah maka demi menunjang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, penerapannya harus dilakukan agar segera terwujud prakarsa ekonomi ummah dan *falah* akan tercapai melalui sinergi dan kolaborasi program-program yang tepat sasaran dan bernilai guna. Pembangunan modal insan yang dalam hal ini sumber daya manusia umat Islam dilihat sebagai strategi jangka panjang yang mapan, berdaya tahan, dan berdaya saing. Keterbatasan penelitian ini adalah isi yang masih butuh penyempurnaan, medan

penelitian yang masih terbilang kecil, dan analisis isi yang membutuhkan data yang lebih detail dan lengkap. Fokus pembahasan yang cukup hanya di Kabupaten Belitung.

Saran bagi peneliti sendiri belum bisa mengakomodir seluruh lembaga-lembaga filantropi Islam di Kabupaten Belitung untuk benar-benar bisa mendeskripsikan secara detail hasil sinkronisasi program yang tepat untuk disandingkan dengan kebijakan pembangunan sosial di Kabupaten Belitung. Bagi akademis, agar bisa dikembangkan menjadi karya tulis baru tentang Gerakan Filantropi Islam. Bagi masyarakat dan juga pemerintah bisa dijadikan acuan untuk mensinergikan serta mengkolaborasikan program kebijakan pembangunan sosial yang bernilai guna.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zaenal. "Manifestasi Dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi Di Rumah Zakat Kota Malang" 15 (2012): 18.
- Bakri, Syamsul. "Agama, Persoalan Sosial, Dan Krisis Moral," 2009, 5.
- Delfiyando, Rizki. "Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)." Iain Metro, 2019.
- Fauzia, Amelia. "Islamic Philanthropy In Indonesia: Modernization, Islamization, And Social Justice." *Austrian Journal Of South-East Asian Studies* Vol 10 No 2 (December 30, 2017): 223-236 Pages. <https://doi.org/10.14764/10.Aseas-2017.2-6>.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan Ziswaf Di Bmt Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, No. 2 (November 11, 2016): 227. <https://doi.org/10.21043/Iqtishadia.V9i2.1729>.
- Kasdi, "Membangun Kemandirian Melalui Filantropi Kaum Perempuan; Potensi Kedermawanan Untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia." *Palastren Jurnal Studi Gender* 12, No. 1 (June 12, 2019): 99. <https://doi.org/10.21043/Palastren.V12i1.3184>.
- Latief, Hilman. *Politik Filantropi Islam Di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Latief, Hilman, And Zezen Zaenal Mutaqin. *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, Dan Filantropi*. 1. Jakarta: Serambi Ilmu Sejahtera, 2015.
- Machrus, And Frida Utami. "Peran Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas." In *Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Lppm Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. Purwokerto, 2015.
- Mohamad, Nor Sahida, And Sanep Ahmad. "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal," 2013, 17.
- Pemerintah Kabupaten Belitung. "Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023." Bappeda Kabupaten Belitung, 2019.
- Ranto, Ranto. "Dinamika Politik 'Keterwakilan' Di Babel: Studi Awal Pemilukada Gubernur Bangka Belitung Tahun 2017." *Society* 4, No. 1 (June 30, 2016): 71–80. <https://doi.org/10.33019/Society.V4i1.37>.
- Raymen, Kevin. *Sejarah Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Arise Consultancies, 2003.
- Saifullah, Edyson. "Pembangunan Dalam Islam." *I-Finance*, 2, 2 (2016): 92–106.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Sulkifli, Sulkifli. "Filantropi Islam Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Indonesia." *Palita: Journal Of Social-Religion Research* 3, No. 1 (August 27, 2018): 1–12. <https://doi.org/10.24256/Pal.V3i1.190>.
- Susantyo, Badrun. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Pedesaan Telaahan Atas Tulisan David C. Korten." *Sosio Informa* 12, No. 3 (December 20, 2007). <https://doi.org/10.33007/Inf.V12i3.971>.
- Ulza, Emaridial, And Herwin Kurniawan. "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam" 2, No. 1 (2018): 11.
- Winarno, Budi. *Etika Pembangunan*. Jakarta: Caps, 2013.
- "Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023."
- Upik Sumarti, *Sejarah Belitung*, diakses pada <https://portal.belitung.go.id>, pada tanggal 7 Mei 2022.
- "Kabupaten Belitung Dalam Angka 2022" (pdf). www.belitungkab.bps.go.id. hlm. 13, 62, 147-148. Diakses pada tanggal 7 Mei 2022.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000" (pdf). www.dpr.go.id. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 7 Mei 2022.
- "Kebudayaan Masyarakat Belitung". <https://www.belitunginfo.com/belitung/kebudayaan-masyarakat-belitung/>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2022.
- "Seni Budaya". <https://dispar.belitung.go.id/seni-budaya>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2022.
- "Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan". <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2022.
- "Program LAZISMU Kabupaten Belitung". <https://lazismubelitung.or.id/program-lazismu-belitung/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.